

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai *negative legislature* yang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga berperan sebagai *positive legislature*. Terlebih dengan adanya Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang amabang batas pencalonan kepala daerah.

Fokus penelitian yang diamati adalah 1) Apakah Mahkamah Konstitusi dapat berperan sebagai *positive legislature*?, 2) Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* justru memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kepastian hukum, terutama ketika lembaga legislatif gagal merespons kebutuhan hukum masyarakat secara cepat dan tepat. Dengan demikian, peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan norma baru bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, melainkan bentuk koreksi konstitusional yang bertujuan menjamin kepastian, keadilan, dan keberlakuan hukum secara efektif.

Kata kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, *Positive Legislature*, *Kepastian Hukum*, *Pilkada*, *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*

ABSTRACT

The Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) holds the primary authority to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, the Constitutional Court not only acts as a negative legislature by annulling norms that contradict the Constitution but also functions as a positive legislature. This is particularly evident in Decision Number 60/PUU-XXII/2024 regarding the candidacy threshold for regional head elections.

This research focuses on: (1) Whether the Constitutional Court can act as a positive legislature, and (2) How the role of the Constitutional Court as a positive legislature in Decision Number 60/PUU-XXII/2024 may affect legal certainty in the implementation of the 2024 regional elections. This study employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches.

The results indicate that the Constitutional Court's action as a positive legislature contributes significantly to the creation of legal certainty, especially when the legislative body fails to respond promptly and appropriately to the legal needs of society. Thus, the active role of the Constitutional Court in forming new norms is not a violation of the principle of separation of powers, but rather a form of constitutional correction aimed at ensuring certainty, justice, and the effective application of law.

Keywords: *Constitutional Court, Positive Legislature, Legal Certainty, Regional Elections, Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024*